

PERDAMAIAN DAN KEMISKINAN

Makna dari sebuah hadiah Nobel

Kompas, Rabu, 01 November 2006

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita

"Perdamaian tidak akan dapat diraih hingga sebagian besar rakyat menemukan cara keluar dari kemiskinan...."

-Ketua Komite Nobel, Ole Danbolt Mjoes

Penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian 2006 kepada Muhammad Yunus dan Grameen Bank, merupakan berita mengejutkan. Betapa tidakb aru kali ini hadiah Nobel diberikan kepada seorang ekonom yang berkiprah dalam penyediaan kredit mikro bagi masyarakat miskin. Berita itu bergema dan disambut gembira oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia, serta mendapat ucapan selamat para pemimpin dunia, termasuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga salah seorang kandidat penerima hadiah tersebut.

Peristiwa itu menunjukkan bahwa perdamaian tidak hanya terbatas pada upaya meredakan pertikaian antarkelompok, permusuhan antarbangsa atau peperangan, namun lebih luas dari itu. Dengan mengambil momentum penghargaan kepada Yunus dan Grameen Bank tersebut saya, sebagai seorang yang peduli dan pernah terlibat dalam pemberantasan kemiskinan, mencoba menarik benang merah tentang makna perdamaian serta pentingnya pembebasan rakyat dari kemiskinan sebagai sebuah pilar utama perdamaian.

Makna Perdamaian.

Masyarakat atau bangsa di manapun secara fitriah pasti mendambakan suasana damai. Perdamaian dapat diartikan sebagai suatu upaya atau proses menuju suasana damai, yaitu suasana aman dan tentram, bebas dari permusuhan dan pertikaian, serta bebas dari tekanan oleh suatu pihak terhadap pihak lain dalam bentuk apapun. Bentuk tekanan yang paling mudah dipahami adalah tekanan fisik atau politik. Maka, perdamaian cenderung ditafsirkan sebatas sebagai upaya untuk terbebas dari penjajahan, penindasan atau tekanan politik.

Realitas menunjukkan bahwa bentuk penjajahan dan tekanan suatu bangsa atas bangsa lainnya, atau suatu masyarakat atas masyarakat lainnya, bukan semata berupa tekanan fisik. Bentuk penjajahan dan tekanan di era global sekarang ini bisa bersifat sangat halus bahkan seringkali memiliki kekuatan legal. Kemiskinan dapat dikategorikan sebagai hasil dari penjajahan nonfisik tersebut. Oleh karenanya, perdamaian masih tetap akan merupakan isu yang membara selama tingkat kemiskinan yang menjadi penyebab ketidak damaian baik itu di Indonesia maupun di dunia masih sangat besar.

Hadiah Nobel Perdamaian bagi Muhammad Yunus dan Grameen Bank menunjukkan bahwa pemberantasan kemiskinan justru dapat merupakan jalan keluar dari dunia yang penuh konflik dan pertikaian. Pesan moralnya adalah bahwa mengupayakan perdamaian tidaklah cukup

sekedar menghentikan peperangan atau meredakan pertikaian, namun juga haruslah merupakan sebuah perjuangan membangun dunia yang berkeadilan. Oleh karena itu dunia dipandang perlu lebih memperhatikan pemberantasan kemiskinan sebagai salah satu bentuk terburuk ketidakadilan. Salah satu penyebab ketidakdamaian, yakni hilangnya martabat kemanusiaan karena kemiskinan, serta keputusasaan karena tidak ada jalan keluar dari perangkap kemiskinan, harus diatasi mulai dari akarnya.

Berbagai faktor ekonomi dan sosial ikut menyebabkan tidak terwujudnya suasana damai itu. Kesenjangan ekonomi dalam suatu masyarakat atau bangsa dapat merupakan pemicu terjadinya permusuhan karena kecemburuan sosial yang mendalam. Kesenjangan ekonomi adalah wujud ketidakadilan ekonomi, yakni adanya sekelompok masyarakat yang hidup secara berlebihan sementara kelompok masyarakat lainnya hidup dalam serba kekurangan dan tanpa harapan.

Pengalaman Indonesia

Nobel Perdamaian bagi Yunus dan Grameen Bank pada hakikatnya bukanlah semata penghargaan bagi yang bersangkutan, melainkan juga bagi upaya pemberantasan kemiskinan melalui program pembangunan yang berkeadilan serta berkelanjutan (*sustainable*) di seluruh dunia. Upaya pemberantasan kemiskinan dari akar-akarnya tersebut mulai mengemuka di akhir 1980-an sebagai reaksi dari paradigma pembangunan yang mementingkan pertumbuhan, namun menimbulkan kesenjangan dan rasa ketidakadilan yang makin besar di masyarakat. Upaya untuk membalik paradigma pembangunan seperti itu juga telah dilakukan di Indonesia melalui pengembangan program pemberantasan kemiskinan yang holistik seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Dalam mengembangkan program untuk Grameen Bank, Yunus menekankan bahwa sasaran program haruslah lapisan yang paling miskin di masyarakatnya. Dari kelompok masyarakat miskin, perempuan adalah kelompok masyarakat yang paling rawan (*vulnerable*) menanggung akibat kemiskinan. Oleh karenanya, kredit yang diberikan Grameen Bank difokuskan untuk para perempuan yang tidak memiliki jaminan kolateral sehingga tidak layak-bank (*bankable*) oleh bank-bank konvensional. Program IDT yang saya kembangkan di Bappenas bersama sejumlah pakar dan aktivis pemberdayaan masyarakat tahun 1993 juga ditujukan pada kelompok masyarakat yang paling miskin (*the poorest of the poor*), yakni pada keluarga-keluarga miskin di desa-desa miskin dan terbelakang. Memang pada waktu kami di Bappenas merancang salah satu rujukan utama adalah pengalaman Grameen Bank dan metode yang ditempuhnya.

Program pembangunan berkeadilan seperti yang dilakukan oleh Grameen Bank dan diupayakan melalui IDT sama sekali tidak bersifat *hadiah untuk kemiskinan*, melainkan justru menumbuhkembangkan kapasitas masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Upaya pengembangan kapasitas masyarakat itu dilakukan oleh masyarakat sendiri tetapi melalui mekanisme kelompok. Pembentukan kelompok merupakan langkah awal yang paling strategis dan menentukan keberhasilan program itu selanjutnya. Di dalam kelompok masyarakat miskin bersama-sama menentukan penggunaan dana tersebut dan pengawasannya. Dengan demikian selain menumbuhkan kegotong royongan juga membangun kemandirian masyarakat itu sendiri.

Untuk memperkuat penumbuhan kemandirian masyarakat tersebut, dilakukan pendampingan terhadap masyarakat sasaran. Pendamping diusahakan pertama-tama dari anggota masyarakat sendiri yang mampu atau para petugas yang ada di desa seperti penyuluh pertanian, guru dsbnya. Jika itupun tidak memadai maka diperbantukan tenaga sukarela yang sudah terlatih yang harus bersedia tinggal ditengah-tengah masyarakat miskin. Pendekatan serupa digunakan oleh Grameen Bank, di mana para staf bank tersebut langsung mendatangi

masyarakat sasaran secara *door to door*. Yunus percaya bahwa cara itulah yang lebih tepat digunakan mengingat bahwa masyarakat miskin memiliki hambatan psikologis kalau harus mendatangi bank untuk mengajukan pinjaman. Cara tersebut bukan saja terbukti efektif bagi pengentasan kemiskinan, melainkan juga bagi Grameen Bank sendiri. Kecuali pada beberapa tahun saja setiap tahunnya Grameen Bank selalu mencatat keuntungan dari pemberian kredit pada masyarakat termiskin tersebut. Dalam Program IDT, pemerintah tentu tidak mengambil keuntungan. Pengembalian dana tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat agar berputar menjadi dana bergulir sehingga dana produktif di tingkat masyarakat akan terakumulasi semakin besar.

Besarnya dana juga yang dipinjamkan oleh Grameen Bank dan IDT juga hampir hampir sama. Dalam program IDT setiap desa yang terindikasi miskin memperoleh Rp 20 juta, yang dibagi diantara kelompok-kelompok yang ada di desa tsb. Jumlah kelompok disatu desa dan jumlah anggota setiap kelompok sangat bervariasi, tetapi jika satu desa ada 10 kelompok, dan setiap kelompok anggotanya kurang lebih 20 orang, maka masing-masing anggota akan memperoleh modal usaha Rp 100 ribu, yang menurut kurs pada waktu itu adalah sekitar \$40. Yunus memulai kegiatannya 30 tahun yang lalu dengan memberi pinjaman \$ 27. Untuk daerah pedesaan yang miskin nilai tsb sudah memadai apabila dikelola dan dibimbing dengan baik.

Program pemberantasan kemiskinan secara berkelanjutan seperti itu semestinya mendapat tempat dalam arus utama (*mainstream*) pembangunan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Dengan pendekatan seperti itu, demokratisasi ekonomi akan lebih mungkin terwujud dan masyarakat miskin memperoleh pijakan yang lebih *fair* dalam menghadapi pasar bebas.

Sebenarnya kita tengah menyaksikan adanya pergeseran pemikiran kearah itu. Kita bisa ambil contoh dua ekonom kontemporer yang besar, Joseph Stiglitz (pemenang hadiah Nobel 2001 di bidang ekonomi) dan Jeffery Sachs (*The End of Poverty*, 2005) yang sangat kritis terhadap kebijakan serta penanganan masalah ekonomi dan pembangunan dunia berkembang oleh negara-maju yang dimotori IMF dan Bank Dunia. Contoh lainnya, CK Prahalad, menunjukkan bahwa dunia korporasi dapat memperoleh keuntungan dengan melibatkan secara aktif kelompok miskin dalam proses bisnis secara menguntungkan. (*The Fortune at the Bottom of the Pyramid. Eradicating Poverty through Profits*, 2006).

Penghargaan Nobel Perdamaian 2006 kepada Muhammad Yunus dan Grameen Bank makin meyakinkan kita bahwa pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan bertemakan pemberantasan kemiskinan merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar.*